

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana, Jakarta, 2012.
- Bagir Manan. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Cet. Ke-1. FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- , *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Dasril Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rineka Cipta, Jambi, 2005.
- Doddy Radjsa Waluyo “*Hanya ada Satu Pejabat Umum Notaris*” Artikel, Media Notaris, Februari 2010 hal.41
- Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2018.
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*; Jakarta : Erlangga, 1999
- Habieb Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- G. Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2015.
- Harun Alrasid. *Pengisian Jabatan Presiden*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Adminsitratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Rafika Aditama Bandung 2013

- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum Dan Keperanannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumnus, Bandung, 2004
- Leny Agustan dan Khairulnas. *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*. UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Bisnis*. Alumnus, Bandung, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moh. Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. cet. 13, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- *Pembuktian dan Daluwarsa*. Intermasa, Jakarta, 1986.
- *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2006.
- *Hukum Acara Perdata*. Binacita, Jakarta, 1982.
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*. CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. ed. 5, cet. 2, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sebastian Salang, M. Djadijono, I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, *Menghindari Jeratan Hukum bagi Anggota Dewan*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2009
- *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 1979.
- Victor Simatupang dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Saifudien DJ, Pertanggungjawaban (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), Artikel.
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001
- Rusdianto sesung, *Hukum & politik hukum Jabatan Notaris* R.A. De.Rozarie, Jawa Timur, 2017
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992),
- Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005

B. Jurnal/Karya Ilmiah:

- A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015, h. 13-14 (selanjutnya ditulis A.A. Andi Prajitno I).
- Ariy Yandillah, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/35509-ID-tanggung-jawab-notaris-pengganti-terkait-pembuatan-akta-notaris-yang-merugikan-p.pdf>, tanggal akses 2 Februari 2021.
- Eka Dwi Lasmiatin, Tesis dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir”, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018.
- Endang Purwaningsih, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, Diterbitkan pada Jurnal ADIL: Jurnal Hukum FH YARSI Vol.2 No.3 Desember 2011, ISSN: 2086-6054/
- Muhammad Farhat Abbas. Disertasi. *Pengisian Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan*

Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945. Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran. Bandung, 2013.

Mohd. Gazali Rais, “Kedudukan Notaris Selama Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 2010

Putu Mas Maya Ramanti, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu*, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Artikel, Email: m a y a r a m a n a t i @ g m a i l . c o m.

Rahmad Hendra, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1. download.portalgaruda.org, tanggal akses 10 Maret 2017.

Nurokhman, “Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Uiniversitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.

C. Kamus:

Bambang Marhijanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*. Bintang Ilmu, Surabaya, 2004.

R. Subekti dan Tirtosudibio. *Kamus Hukum*. Pradnya, Jakarta, 1980.

Saleh Adiwinata dkk. *Kamus Istilah Hukum*. Bina Cipta, Bandung, 1983.

Purwadarminta, S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1985.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*, Depdiknas, Jakarta, 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 10 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara. UU Nomor 5 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

[Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum](#). UU Nomor 7 Tahun 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris, Permen Kum&Ham No 19 tahun 2019.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Permen Kum&Ham No.16 tahun 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211

[Undang-Undang Tentang Advokat](#). UU Nomor 18 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Kode Etik Advokat